

Pengaruh Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Dini Aulia Zahra¹, Sukmini Hartati², Sri Hartaty³

Politeknik Negeri Sriwijaya

diniauliazahra12@gmail.com , sukminihartati@polsri.ac.id , srihartaty@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of audit findings, the size of local governments, and dependence on the central government on the implementation of follow-up actions on the recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) in 23 regencies and cities in Aceh Province for the 2020–2024 period. This study was motivated by the trend of a significant decline in the TLRHP rate in Aceh Province. The research method employed a quantitative approach using secondary data from the BPK RI audit reports (LHP) and local government financial reports (LKPD) obtained through the BPK RI's E-PPID portal. Using a saturated sampling technique, a total of 115 samples were obtained. Data analysis was conducted using panel data regression with the Random Effects Model (REM) as the best-fit estimation model, using EViews 13. The results of the study indicate that, when analyzed individually, audit findings have a positive and significant effect on TLRHP ($0.0000 < 0.05$), and the size of the local government (total assets) also has a positive and significant effect ($0.0195 < 0.05$). However, dependence on the central government does not have a significant effect ($0.3354 > 0.05$). However, dependence on the central government did not have a significant effect ($0.3354 > 0.05$). Collectively, the three variables have a significant effect on TLRHP ($0.000000 < 0.05$) with an adjusted R-squared value of 0.361756, meaning that the independent variables account for 36.18% of the variation.

Keywords: *Audit Findings, Size of Local Government, Dependence on the Central Government, Follow-up on Recommendations from BPK Audit Findings, Random Effects Model.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tren penurunan signifikan tingkat TLRHP di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari LHP BPK RI dan LKPD melalui E-PPID BPK RI. Melalui teknik sampling jenuh, diperoleh total 115 sampel. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model estimasi terbaik Random Effect Model (REM) berbantuan EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap TLRHP ($0,0000 < 0,05$), dan ukuran pemda (total aset) juga berpengaruh positif serta signifikan ($0,0195 < 0,05$). Namun, ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan ($0,3354 > 0,05$). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap TLRHP

(0,000000<0,05) dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,361756, yang berarti kontribusi pengaruh variabel independen adalah sebesar 36,18%.

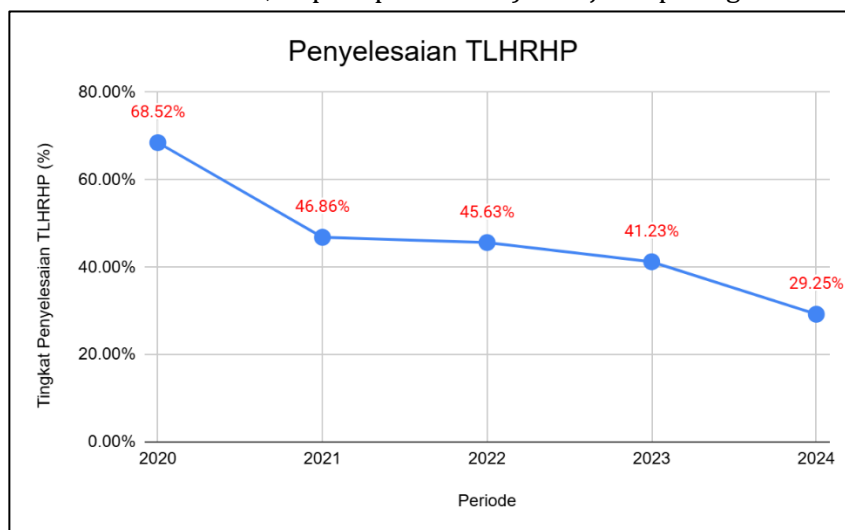
Kata Kunci: Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pusat, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Random Effect Model.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi opini audit, temuan pemeriksaan, serta rekomendasi perbaikan. Esensi dari proses pemeriksaan terletak pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Namun, sering kali ditemukan kesenjangan (gap) antara jumlah rekomendasi yang diterbitkan dengan realisasi penyelesaian tindak lanjut oleh entitas terperiksa. Berdasarkan data nasional, tingkat penyelesaian menunjukkan fluktuasi dan masih menyisakan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (Artha et al., 2024). Fenomena ini sangat relevan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh menerima alokasi dana transfer dari pusat dalam jumlah yang relatif besar. Berdasarkan data E-PPID BPK (2026), Provinsi Aceh mencatatkan alokasi pendapatan transfer tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun didukung sumber daya fiskal dan dana Otonomi Khusus yang besar, tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di Provinsi Aceh justru menunjukkan tren penurunan drastis selama kurun waktu 2020–2024, yaitu dari 68,52% pada tahun 2020 merosot menjadi 29,25% pada tahun 2024 (penurunan sebesar 39,27 poin persentase). Disajikan pada gambar 1.



Sumber: <https://e-ppid.bpk.go.id/> (data diolah, 2026)

Gambar 1 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Provinsi Aceh

Tingkat penyelesaian tindak lanjut dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional dan karakteristik finansial yang melekat pada pemerintah daerah. Temuan audit diduga memengaruhi tingkat penyelesaian rekomendasi BPK, sebab faktor lain seperti kelemahan pengendalian internal, ketidakpatuhan, pengawasan DPRD, dan akses informasi publik terbukti tidak berpengaruh signifikan. Besarnya temuan mencerminkan lemahnya pengendalian dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga semakin besar nilainya terutama terkait pengembalian kerugian negara ke kas daerah semakin kompleks pula upaya perbaikannya (Saputra & Aryani, 2020).

Ukuran pemerintah daerah (diproksikan dengan total aset) juga menjadi faktor penentu karena mencerminkan kapasitas ekonomi, SDM, sistem administrasi, dan anggaran untuk menindaklanjuti audit. Selain itu, berdasarkan teori visibilitas, Pemda beraset besar mendapat pengawasan publik yang lebih tinggi, memicu dorongan kuat untuk menjaga reputasi serta kepatuhan (Pratama & Rohman, 2023). Faktor ketiga adalah tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat yang diukur dari proporsi dana transfer (seperti DAU) terhadap total pendapatan. Tingginya ketergantungan ini membatasi fleksibilitas anggaran daerah untuk melakukan perbaikan sistem yang direkomendasikan BPK, sehingga memengaruhi optimalisasi tindak lanjut (Nugroho & Handayani, 2021).

Hubungan ini dijelaskan melalui teori keagenan (agency theory) untuk menganalisis mitigasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen lewat tiga variabel tersebut. Temuan Audit sebagai indikator ketimpangan informasi yang menunjukkan ketidakjujuran pelaporan, sehingga tindak lanjut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan. Kemudian Ukuran Pemerintah Daerah mencerminkan kompleksitas organisasi dan biaya keagenan yang mendorong responsivitas demi menjaga legitimasi. Dan selanjutnya variabel Ketergantungan Pusat Berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang menekan Pemda agar mematuhi standar akuntabilitas nasional.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori Keagenan pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent). Menurut Ghozali (2020:86), Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kerja sama antara pihak yang memberi wewenang (pemilik) dan pihak yang menerima wewenang (pengelola). Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana anggaran disusun dan dikelola pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan

mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima. Variabel ini diukur secara absolut menggunakan total nilai nominal Rupiah dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti oleh pemda dalam periode amatan.

Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil dari perbandingan antara kondisi riil di lapangan dengan kriteria peraturan yang berlaku, yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian intern atau ketidakpatuhan. Temuan audit dinilai berdasarkan nilai nominal Rupiah dari penyimpangan administrasi keuangan, kelebihan pembayaran, atau kerugian daerah yang tercatat dalam LHP BPK. Semakin besar nilai nominal temuan audit, semakin besar pula sorotan publik dan risiko hukum yang dihadapi daerah, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk bertindak lebih responsif dalam menyelesaikannya.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah mencerminkan skala kapasitas ekonomi dan besaran entitas suatu pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproksikan melalui logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah daerah dengan aset yang besar umumnya memiliki infrastruktur birokrasi yang lebih mapan, sistem manajemen informasi yang lebih baik, serta kapasitas fungsi pengawasan internal (Inspektorat) yang lebih memadai untuk mempercepat penuntasan rekomendasi audit.

Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Ketergantungan pada pemerintah pusat menggambarkan sejauh mana struktur pendanaan APBD suatu daerah bersandar pada dana transfer pusat (dana perimbangan) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel ini diukur melalui rasio persentase total dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah. Tingginya rasio ketergantungan fiskal mengindikasikan keterbatasan kemandirian keuangan daerah, yang dapat membatasi alokasi anggaran operasional untuk penguatan pengawasan internal di tingkat lokal.

Kerangka Berfikir

Studi ini berfokus pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Analisis ini dari faktor faktor independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dengan belanja pegawai sebagai variabel dependen. Kerangka berfikir ini berfungsi sebagai dasar dalam mengembangkan hipotesis dan menggambarkan pengaruh dari variabel independens terhadap variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, lokasi penelitian berfokus pada wilayah administratif Provinsi Aceh, dengan objek pengamatan seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota se-Provinsi Aceh periode tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024, yang diperoleh secara resmi melalui portal E-PPID BPK RI.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 entitas, terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh (census sampling), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, total observasi amatan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 115 sampel (23 kabupaten/kota $\times$ 5 tahun).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) yang relevan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah, mentabulasi, menyajikan, dan menghitung data yang telah terkumpul guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis (Sugiyono, 2023:206). Tahapan analisis kuantitatif ini meliputi pengelompokan, tabulasi, perhitungan, penyajian data, hingga pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang menggabungkan dimensi cross-section dan time-series untuk menganalisis pengaruh temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews karena keunggulannya dalam mengestimasi model secara akurat (CEM, FEM, REM), memfasilitasi Uji Chow dan Uji Hausman, serta menangani masalah asumsi klasik (terutama heteroskedastisitas pada data keuangan sektor publik). Hal ini memastikan hasil estimasi bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan valid.

Uji Pemelihan Model

Dalam pengujian data panel, pemilihan model pada data panel terbagi menjadi tiga pendekatan yang digunakan yaitu model Fixed Effect, Random Effect dan Common Effect. Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis, maka ketiga pendekatan model harus dipilih salah satu yang paling tepat. Model Random Effect

terpilih 2 (dua) kali pada Uji Hausman dan Uji Lagrangen Multiplier, sedangkan Model Common Effect terpilih 1 (satu) kali pada Uji Chow. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga model (Model Common Effect, Model Fixed Effect, dan Model Random Effect), penggunaan model yang terbaik adalah Model Random Effect dalam menginterpretasikan regresi data panel pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji linieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan normalitas, namun tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS), sehingga dalam data panel cukup di Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas (Basuki, 2021: 143).

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas bisa dibandingkan R kuadrat regresi variabel bebas terhadap variabel terikat dengan R kuadrat regresi antar variable bebasnya. Jika R² regresi variabel bebas terhadap variabel terikat lebih besar dari R² regresi antar variable bebasnya, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mengandung multikolinearitas (Basuki, 2021: 27).

Hasil Uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	Y
X1	1.000000	0.254343	0.276975	0.638529
X2	0.254343	1.000000	-0.282081	0.331436
X3	0.276975	-0.282081	1.000000	0.053446
Y	0.638529	0.331436	0.053446	1.000000

Sumber: Output EViews 13 (data diolah 2026)

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji diatas menunjukkan hubungan antar variabel sebagai berikut:

- Hubungan koefisien X1 dan X2 sebesar $0.254343 < 0.85$
- Hubungan koefisien X1 dan X3 sebesar $0.276975 < 0.85$
- Hubungan koefisien X2 dan X3 sebesar $-0.282081 < 0.85$

Berdasarkan hasil hubungan setiap variabel independen tidak melebihi dari 0,85 dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021: 141).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menganalisis model regresi dalam variansi akurabilitas pengamatan residual terhadap pengamatan lain. Masalah

heteroskedastisitas dalam data panel dapat diatasi dengan uji white pada saat estimasi (Basuki, 2021: 68). Teknik estimasi yang digunakan pada Random Effect Model adalah Generalized Least Squares (GLS). Menurut Basuki (2021) sifat dasar dari estimator GLS sudah secara otomatis mengoreksi dan membersihkan model dari gangguan varians heteroskedastisitas serta korelasi antar-waktu sejak awal proses kalkulasi matriksnya dijalankan oleh EViews. Keuntungan utama dari model yang juga disebut *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) ini adalah kemampuannya dalam menghilangkan heteroskedastisitas. Mengingat hasil pengujian dalam penelitian ini menetapkan *Random Effect Model* (REM) sebagai model estimasi yang terpilih, maka model ini secara otomatis telah terbebas dari masalah varians dan tidak memerlukan uji heteroskedastisitas lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, uji Chow menunjukkan nilai signifikansi $<0,05$ yang mengindikasikan model Fixed Effect lebih baik daripada Pooled Least Square. Selanjutnya, pengujian melalui uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,3354 ($>0,05$), sehingga disimpulkan bahwa model estimasi terbaik yang paling tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Hasil estimasi regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) berbantuan EViews 13 disajikan pada Tabel berikut:

Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.08852	7.936175	-1.649223	0.1019
X1	0.763139	0.111462	6.846642	0.0000
X2	0.647027	0.273027	2.369825	0.0195
X3	-0.016927	0.017496	-0.967515	0.3354

Sumber: Data Sekunder Diolah Melalui EViews 13, 2026

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0000 $<0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 6,846642 yang jauh lebih besar dari t-tabel 1,98157. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai nominal Rupiah dari temuan audit yang diterbitkan oleh BPK, maka hal tersebut bertindak sebagai dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk bersikap responsif. Nilai temuan yang tinggi meningkatkan eksposur risiko hukum dan reputasi politik daerah di mata publik, sehingga memaksa kepala daerah dan jajaran birokrasi untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut demi menjaga akuntabilitas administrasi.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Nilai signifikansi tercatat sebesar $0,0195 < 0,05$ dengan t -hitung $2,369825 > t$ -tabel $1,98157$. Skala pemerintahan daerah yang diproksikan dengan total aset mencerminkan tingkat kapasitas ketersediaan sumber daya dan kemudahan koordinasi. Daerah dengan total aset yang besar memiliki kelonggaran kapasitas manajerial dan infrastruktur pengawasan internal (Inspektorat) yang jauh lebih memadai, baik dari segi kuantitas staf maupun kualitas kompetensi auditor internal, untuk memonitor dan menuntaskan setiap rekomendasi yang diberikan BPK secara berkala.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,3354 > 0,05$ dan nilai t -hitung $0,967515 < t$ -tabel $1,98157$. Kondisi ini disebabkan karena alokasi transfer dana dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagian besar didominasi oleh skema belanja wajib (mandatory spending) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang formulasinya diatur baku oleh undang-undang nasional. Fluktuasi rasio ketergantungan fiskal ini tidak secara otomatis berfungsi sebagai instrumen sanksi ataupun insentif finansial langsung yang mempengaruhi kepatuhan birokrasi daerah terhadap penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK.

Secara Simultan, pengujian menunjukkan bahwa Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini didukung oleh capaian nilai F -statistic sebesar $22,53840$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) sebesar $0,361756$ menjelaskan bahwa variasi dari ketiga variabel independen tersebut mampu berkontribusi menjelaskan dinamika naik-turunnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar $36,18\%$. Sementara itu, sisa variasi kualitatif sebesar $63,82\%$ diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model analisis, seperti komitmen pimpinan daerah, kualitas sistem manajemen tindak lanjut, dan tingkat kompetensi fungsional aparat Inspektorat wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap tingkat penuntasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020–2024. Secara parsial, besarnya nilai nominal rupiah dari temuan audit dan skala ukuran pemerintah daerah (kapasitas total aset) terbukti memberikan dampak positif nyata dalam mempercepat penuntasan rekomendasi BPK. Namun, derajat tingkat

ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh operasional yang signifikan dalam mendorong kepatuhan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti menyarankan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk terus meningkatkan komitmen administratifnya dan memperkuat kedudukan serta alokasi sumber daya bagi aparat Inspektorat daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal. Inspektorat perlu membangun sistem pemantauan berbasis digital yang terintegrasi agar penyelesaian rekomendasi tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Bagi BPK RI, diharapkan dapat terus mengoptimalkan forum pemptakhiran data tindak lanjut bersama pemerintah daerah secara berkala. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas rentang waktu pengamatan serta menambah variabel non-keuangan lainnya seperti tata kelola pemerintahan (good governance), komitmen kepala daerah, maupun tindak lanjut sanksi administratif guna meningkatkan daya prediksi model regresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, S., Dewata, E., & Nurhasanah. (2024). Determinants of factors influenced the follow-up of BPK RI audit recommendations. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 15(1), 45–58.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2022. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data laporan keuangan hasil pemeriksaan (LHP) Provinsi Aceh periode 2020–2024 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2025. E-PPID Pusat BPK RI. <https://e-ppid.bpk.go.id/>
- Bastian, I. (2010). *Audit sektor publik*. Erlangga.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis regresi data panel untuk penelitian ekonomi dan bisnis*. Danisa Media.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Analisis ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 110–123.
- Dewi, R., & Putri, A. (2024). Pengaruh tingkat ketergantungan fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 89–102.
- Fadhilsyah, M. R., Mubarak, M. H., & Armaini, R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 12–25.
- Furqan, F., dkk. (2020). Analisis komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 145–160.

- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Hardiningsih, P., dkk. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah daerah dan ketergantungan fiskal terhadap akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(3), 201–215.
- Harlin, H., Nadirsyah, N., & Meutia, M. (2023). Analisis tingkat ketergantungan transfer fiskal spesifik (dana otsus) di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 9(1), 34–48.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). Metodologi penelitian sektor publik. *Sains Indonesia*.
- Kusumarni, K. Y. M., & Respati, N. W. (2022). Determinants of the level of completion following up recommendations on the audit results of BPK RI to local governments. *International Journal of Accounting and Finance Review*, 11(2), 77–88.
- Lestari, S., & Handayani, T. (2022). Kapasitas organisasi dan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit pemerintahan. *Jurnal Tata Kelola Sektor Publik*, 8(1), 56–69.
- Lutfi, L., dkk. (2020). Hubungan keagenan dan aspek transparansi finansial di sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(2), 112–126.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. *Andi*.
- Napitupulu, N., dkk. (2021). Ekonometrika dan analisis data panel untuk akuntansi. *Madani*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Pramono, P., & Kurniawan, K. (2023). Esensi temuan audit dan pengendalian internal dalam teori akuntabilitas agen. *Jurnal Audit dan Akuntabilitas Sektor Publik*, 11(1), 15–29.
- Pratama, A., & Wibowo, S. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan rekomendasi audit BPK. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 80–94.
- Puspitasari, P. S., & Ratmono, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Rahayu, R., dkk. (2024). Integritas birokrasi dan kecepatan agen dalam menyelesaikan rekomendasi audit. *Jurnal Administrasi Publik dan Good Governance*, 19(2), 134–148.
- Rahmawati, R., & Nugroho, N. (2023). Responsivitas pemerintah daerah atas akumulasi temuan audit eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 20(1), 45–59.
- Saputra, H., & Kurniawan, R. (2023). Analisis hubungan fiskal vertikal terhadap TLRHP BPK. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(2), 98–111.

- Sari, S., & Putra, P. (2022). Pengaruh materialitas temuan pemeriksaan BPK terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 10(1), 23–37.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Taufik. (2021). Audit eksternal sebagai mekanisme monitoring perilaku oportunistik agen sektor publik. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1025–1035.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2021). Analisis kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, 5(2), 167–181.